

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, Laporan Penelitian

- Ali, Achmad, 2003, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrianta, Yogi, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Desa Sendangrejo Minggir Sleman Yogyakarta*, Tesis, Program Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ansari, Muhammad Insa, “BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017.
- ASEAN Matters Epicentrum of Growth, “*Industri Energi Surya di Indonesia*”, Disampaikan oleh Direktur Aneka EBT Jakarta, 24 Februari 2023.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asshidique, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaan di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Asshidique, Jimly dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RO, Jakarta.
- Azhar, Muhamad dan Dendy Adam Satriawan, “Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, Edisi 4, November 2018.
- Azwar, Sarifuddin dan Erlies Septiana Nurbani, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bledug Kusuma, *et al.*, 2020, “Pendidikan dan Pelatihan Energi Terbarukan (EBT) di Tingkat Universitas di Indonesia”, *JE-Unisla* 5, no. 2.

Buku Panduan Studi Kelayakan PLTS Terpusat Off-Grid, 2018.

Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, “Implementasi Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS Atap”, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/01/21/3058/implementasi.peraturan.menteri.esdm.tentang.plts.atap>

Friedman, W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta.

Ghaniyyu, Faris Faza dan Nurlina Husnita, 2021, “Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement.” *Jurnal Ilmu Hukum: Morality* 7, no. 1.

Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Insan, Ivan Ahsanul, 2017, *Optimalisasi Simulasi Maximum Power Point Tracking (MPPT) pada Solar-Wind Turbine Menggunakan Metode Incremental Conduction*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang.

Jukic, T., dan Jerkovic, I., 2008, “Sustainable Urban Energy Planning”, <https://hero.epa.go>, diakses pada 7 Mei 2023.

Kansil, C.S.T., *et al.*, 2010, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2010, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021, *Menteri ESDM: Perlu Upaya Konkrit dan Terencana Capai Target Bauran 23% di Tahun 2025*, Siaran Pers Nomor: 458.Pers/04/Sji/2021.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Misna, Andriah Feby, PLTS Atap untuk Industri, *Diskusi*, Daring, 23 Maret 2022.

Modjo, Suci, “PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2019.

Pawitra, dkk, “Review Perkembangan PLTS di Provinsi Bali Menuju Target Kapasitas 108 MW Tahun 2025”, *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, Vol. 19, No. 2, Desember 2020.

Praja, Juhaya S., 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pres, Jakarta.

Sangalang, Amgasussari Anugrahni, 2012, *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriyani, Agustina, 2018, *Jaminan Kepastian Hukum Bagi Investasi di Sektor Pembangkit Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tampubolon, Agus Praditya dan Julius Christian Adiatma, 2019, *Laporan Status Energi Bersih Indonesia: Potensi, Kapasitas Terpasang, dan Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Tahun*, IESR, Jakarta.

Tenar, Redy Iman, 2019, *Kewajiban Pemenuhan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dalam Kontrak Jual Beli Excess Power Pembangkit Listrik Tenaga Surya*

*Atap antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta.

## Internet

Adisuryo, Dendi, “Penundaan Penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021”, <https://adcolaw.com/id/blog/penundaan-penerapan-peraturan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-26-tahun-2021/>, diakses 25 Mei 2023.

Anam, Saiful, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum”, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 23 Oktober 2022.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, “Optimalisasi BPD LH Dalam Pengembangan Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan”, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/kajian%20BPD LH.pdf>, diakses 6 Juni 2023

Dewan Energi Nasional, “Energi Terbarukan Menuju Net Zero Emission”, <https://den.go.id/index.php/dinamispag/index/1253-energi-terbarukan-menuju-net-zero-emission.html>, diakses 8 Maret 2023.

Denny, Septian, “Potensi Energi Tenaga Surya RI 10 Kali Lebih Besar dari Jerman,” [https://www.liputan6.com/bisnis/read/2493191/potensi-energi-tenaga-surya-ri-10-kali-lebih-besar-dari-jerman?utm\\_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm\\_referrer=https%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fbisnis%2Fread%2F2493191%2Fpotensi-energi-tenaga-surya-ri-10-kali-lebih-besar-dari-jerman](https://www.liputan6.com/bisnis/read/2493191/potensi-energi-tenaga-surya-ri-10-kali-lebih-besar-dari-jerman?utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%2F%2Fwww.liputan6.com%2Fbisnis%2Fread%2F2493191%2Fpotensi-energi-tenaga-surya-ri-10-kali-lebih-besar-dari-jerman), diakses 21 Mei 2023.

Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Dasya Mineral, “Implementasi Peraturan Menteri ESDM tentang PLTS Atap”, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/01/21/3058/implementasi.peraturan.menteri.esdm.tentang.plts.atap>, diakses 23 Oktober 2022.

Julian, Muhammad, “ESDM: Penundaan Permen PLTS Atap Bukan untuk Ditinjau Ulang atau Dibatalkan”, <https://industri.kontan.co.id/news/esdm-penundaan-permen-plts-atap-bukan-untuk-ditinjau-ulang-atau-dibatalkan>, diakses 23 Oktober 2022.

Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Terkait Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Jakarta, 1 Desember 2004, hlm. 348.

MTH, "Pasang PLTS Atap, Tagihan Listrik Lebih Hemat," [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/20547/pasang-plts-atap-tagihan-listrik-lebih-hemat/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/20547/pasang-plts-atap-tagihan-listrik-lebih-hemat/0/artikel_gpr),

Pamudji, "Konsep Bangunan Hijau Butuh Insentif Pemerintah," <https://www.beritasatu.com/interior/154113-konsep-bangunan-hijau-butuh-insentif-pemerintah.html>

Sulistyawati, Anik, "AESI: Kendala Penerapan Permen ESDM tentang PLTS Atap Perlu Diatasi", <https://www.solopos.com/aesi-kendala-penerapan-permen-esdm-tentang-plts-atap-perlu-diatasi-1362538>.

Sulaiman, Stefano Reinard, "New Solar Panel Regulation Discourages Public Use", <https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/22/new-solar-panel-regulation-discourages-public-use.html>, diakses 20 November 2022.

Tim Publikasi Hukum Online, "Dari Potensi, Isu, dan Regulasi PLTS Fotovoltaik di Indonesia", Hukum Online, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/dari-potensi--isu--dan-regulasi-plts-fotovoltaik-di-indonesia-lt64777d086d172?page=all>, pada 6 Juni 2023.

Wahyudi, Nyoman Ary, "Polemik Pemasangan PLTS Atap PLN, Ini Solusi Kementerian ESDM", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221021/44/1590167/polemik-pemasangan-plts-atap-pln-inisolusi-kementerian-esdm>, diakses 23 Oktober 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1524).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap oleh Konsumen PT PLN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 948).

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 143 K/20/MEM/2019 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan 2038.